

ABSTRAK

Ika Cartika, *Rekrutmen Calon Kepala Daerah di DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah*

Pemilihan Calon Kepala Daerah di DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung dilaksanakan melalui proses rekrutmen yang ditetapkan oleh partai. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana tahapan-tahapan yang digunakan DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung untuk mendapatkan calon kepala daerah yang sesuai dengan tuntutan partai dan masyarakat.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dasar hukum rekrutmen calon kepala daerah, tahapan-tahapan yang dilaksanakan DPD Partai Golkar dalam proses rekrutmen calon kepala daerah, serta mengetahui relevansi siyasah dusturiyah terhadap rekrutmen calon kepala daerah di DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa Islam adalah agama yang universal. Ajaran islam selalu berkaitan erat dengan nilai-nilai kepemimpinan dan selalu menggunakan unsur-unsurnya dalam hukum sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan kondisi kehidupan sosial yang praktis. Tentunya untuk mengatur, memimpin, dan mengurus kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan cara membawa kepada kemaslahatan dan menghindari kemadharatan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan teknik Studi dokumentasi dan wawancara langsung dengan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung serta dokumen-dokumen lain yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer ialah data yang diperoleh dari DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung mengenai petunjuk pelaksanaan pemilihan calon kepala daerah yang dikeluarkan oleh partai golkar, wawancara langsung dengan pihak DPD partai golkar, serta buku-buku tentang siyasah, sedangkan data sekundernya ialah Undang-undang No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2007 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa, dasar hukum rekrutmen calon kepala daerah di partai golkar disamping didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga melihat kepada hasil keputusan musyawarah nasional partai golkar tentang program umum partai golkar dan musyawarah daerah DPD partai golkar tentang calon kepala daerah. Sedangkan tahapan-tahapannya meliputi tahapan penjangkaran, tahapan penetapan calon dan tahapan kemenangan calon. Relevansi Siyasah dusturiyah dengan rekrutmen calon kepala daerah di DPD Partai Golkar dapat dilihat dari proses pengangkatan pemimpin yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rekrutmen calon kepala daerah harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh partai politik, serta sejalan dengan proses pengangkatan pemimpin dalam siyasah dusturiyah, yang menerapkan prinsip hukum islam dalam pelaksanaannya, diantaranya prinsip keadilan, kebebasan, persamaan dan prinsip musyawarah.